

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Guna Mewujudkan Pertanggungjawaban (Studi di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Elvia Yunita Sari, NIM. 126403203180, pembimbing Fia Rahma, S.E., M.S.A.

Penelitian ini dilatar belakangi tentang penggunaan dana desa di Desa Bungur. Penggunaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan pembangunan desa. penggunaan dana desa di kelola oleh pemerintah desa yang diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) agar pengelolaan keuangan dana desa yang baik dan benar agar tepat sasaran.

Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa. (2) Untuk mendeskripsikan kendala dalam pengelolaan dana desa. (3) Untuk mendeskripsikan pelaporan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini bertempat di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Bungur, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung adalah (1) Mekanisme pengelolaan dana desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan terdapat 5 siklus yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. (2) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu kemampuan sumber daya perangkat desa yang rendah, cuaca, proses pencairan, dan pemerintah. (3) Pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Penyajian Laporan Pemerintah.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Pertanggungjawaban, Peraturan Pemerintah.

ABSTRACT

Thesis with the title "Village Fund Management Accountability Based on Government Regulation Number 71 of 2010 Concerning Government Accounting Standards in Order to Realize Accountability (Study in Bungur Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency)" written by Elvia Yunita Sari, NIM. 126403203180, supervisor Fia Rahma, S.E., M.S.A.

This research is motivated by the use of village funds aims to improve the welfare of rural communities, reduce poverty, and improve community services, and village development. The use of village funds is managed by the village government which is supervised by the BPD (Village Consultative Body) so that the financial management of village funds is good and correct so that it is right on target.

The objectives of this study are (1) To describe the management of village funds. (2) To describe the obstacles in managing village funds. (3) To describe accountability reporting in the use of village funds based on Government Regulation No. 71/2010. This research took place in Bungur Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency.

The method used in this research uses a qualitative approach with a descriptive research type. The data sources obtained are primary and secondary data. Data collection techniques in this research are interviews, observation, and documentation.

The result of research that has been conducted in Bungur Village, Karangrejo District, Tulungagung Regency are (1) The village fund management mechanism is regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages which explains the financial management mechanism there are 5 cycles namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability. (2) The obstacles faced by the village government are the low resource capacity of village officials, the weather, the disbursement process, and the government. (3) Accountability reporting is by Government Regulation Number 71 of 2010 concerning the Presentation of Government Reports.

Keywords: Financial Management, Village Fund, Accountability, Government Regulation.